

Seminar 'Library and Information Science' Unpad

Perpustakaan, Sumber dan Pusat Ilmu

■ Lingga Permesi

Perpustakaan bukan kata yang baru di kalangan masyarakat. Perpustakaan sudah menjamur baik di sekolah umum maupun kejuruan. Mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga universitas. Begitu pula di kantor-kantor, bahkan perpustakaan di tingkat desa atau kelurahan. Namun demikian, masih banyak orang yang memberi definisi salah terhadap perpustakaan dan pustakawan.

Sebagian orang menanggap perpustakaan hanya sekumpulan buku-buku dengan beberapa penjaga perpustakaan di dalamnya. Padahal, perpustakaan tidak hanya sebagai kumpulan buku tanpa ada gunanya. Namun secara prinsip, perpustakaan harus dapat dijadikan atau berfungsi sebagai sumber informasi bagi setiap orang yang membutuhkan.

Perpustakaan bukanlah sekedar tempat meminjam dan mengembalikan buku, tapi merupakan sarana pendidikan atau pembinaan manusia. Bangsa yang ingin maju harus menjadi bangsa yang senang dan biasa membaca serta belajar. Banyak orang yang menjadi besar bukan karena mengikuti pendidikan formal saja di sekolah, tapi karena banyak membaca. Perpustakaan pada hakekatnya merupakan sumber dan pusat ilmu yang akan menjadikan orang dari tidak tahu menjadi tahu.

Begitu pula pustakawan, yang tidak hanya menjadi penjaga dan perawat buku, tetapi pustakawan masa depan adalah manajer informasi dan pengelola pangkalan data. Dengan demikian mereka dapat mengakses informasi melalui komputer dan teknologi telekomunikasi. Informasi yang didapat tidak hanya yang terdapat di katalog atau koleksi perpustakaan yang bersangkutan, tetapi juga yang terdapat

Ada pencitraan perpustakaan yang belum sesuai di mata masyarakat.

pada perpustakaan dan sumber informasi di seluruh dunia.

Maka dari itu, universitas terkemuka di Bandung, Unpad, dalam hal ini Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan (DIIP) menggelar Seminar Nasional dan Kongres Nasional "Library and Information Science: Developments and Challenges" di Gedung Pascasarjana Unpad, Jalan Dipatikir 25, Kota Bandung, Senin (17/9).

Menurut Kepala DIIP, Wina Erwina, seminar ini dilatarbelakangi adanya pencitraan perpustakaan yang belum sesuai di mata masyarakat. Perpustakaan, katanya, diidentikan hanya kumpulan buku-buku dan pustakawan berada di belakangnya. "Beberapa orangtua bah-

kan menanggapi jika anaknya disekolahkan di jurusan perpustakaan, tidak akan bisa makan dan mendapatkan bayaran yang layak. Persepsi ini yang harus diubah,” ungkap dia kepada *Republika*.

Padahal, perpustakaan dan pustakawannya sangat dibutuhkan di era informasi dan kemajuan teknologi komunikasi saat ini. Alumni DIIP Unpad misalnya, sangat cepat terserap ke lapangan kerja, bukan hanya di perpustakaan tetapi juga di beberapa lembaga informasi.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas, Unpad bekerja sama dengan beberapa institusi perpustakaan baik di dalam dan luar negeri. Saat ini, kata Wina, pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan UiTM Malaysia, Universitas Leiden dalam rangka pembuatan sistem informasi naskah arkeologi, Perpustakaan Serawak Malaysia, dan sekolah internasional Arab Saudi. “Kami juga jalin kerja sama dengan UPH membuat program literasi informasi,” tuturnya.

Unpad juga terlibat dalam komite literasi informasi yang bertujuan untuk menghindari plagiat dan menata program-programnya. Belum selesai sampai di situ, pustakawan jurusan DIPP juga mendapatkan beragam penghargaan.

“Pustakawan kami menjadi pustakawan terbaik se-Jawa Barat pada 2012,” ujarnya. Wina optimistis, Departemen Ilmu Informasi dan Ilmu Perpustakaan Unpad mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan bersaing di dunia internasional.

Adapun seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya, Guru Besar Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia Prof Sulisty Basuki, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Ke-

mahasiswaan Unpad, Prof Engkus Kuswarno, dan Imas Maesaroh dari IAIN Sunan Ampel Surabaya serta sejumlah akademisi lainnya.

Sulisty mengungkapkan, perpustakaan menyimpan banyak informasi yang tidak tersedia di internet, terutama untuk buku-buku referensi yang dilindungi hak ciptanya. Perpustakaan juga berfungsi untuk menyimpan dan memelihara arsip.

Bahkan belakangan ini, kata dia, perpustakaan dimanfaatkan untuk mengapresiasi budaya masyarakat dengan diadakannya pameran-pameran, ceramah, diskusi, dan pemutaran film. Namun demikian, manfaat perpustakaan harus ditunjang dengan peran pustakawannya.

Selama ini, kata Sulisty, pustakawan banyak yang tidak profesional karena tak berasal dari pendidikan ilmu perpustakaan di perguruan tinggi. Hal tersebut, ucap dia, dapat dibuktikan dengan sebagian besar kepala perpustakaan di daerah, berasal dari pejabat dinas di lingkungan pemerintahan yang *dirolling* atau dimutasi oleh kepala daerahnya.

“Sehingga, profesi pustakawan di Indonesia sepi peminat karena dianggap tidak profesional,” katanya. Di sisi lain, pendidikan perpustakaan di Indonesia berkembang cukup pesat. Hal ini terbukti dari banyaknya penyelenggara pendidikan tersebut yang tersebar di 18 perguruan tinggi yang menawarkan S1 perpustakaan, selain 25 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program D3, satu perguruan tinggi membuka D2, universitas terbuka (UT), dan lima perguruan tinggi yang membuka pascasarjana. Sayangnya, lulusan dari pendidikan formal tentang perpustakaan ini masih dipandang sebelah mata oleh pengelola Perpustakaan Nasional. ■ ed: agus yulianto



Aspika Samakan Dasar Keilmuan Perpustakaan

■ Lingga Permesi

DIIP Fikom Unpad juga menggagas Kongres Nasional Pembentukan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Indonesia (Aspika). Aspika sendiri diinisiasi saat Kongres Nasional Pembentukan Aspika di Unpad, Bandung, Senin [17/9].

Menurut Ketua DIIP Fikom Unpad, Wina Erwina, pembentukan Aspika sebenarnya sudah dipersiapkan dari 2004, namun urung digelar dan belum terdeklarasi. Aspika ini, kata dia, bukan sebuah asosiasi profesi pustakawan, tapi bertujuan untuk penyamaan dasar keilmuan perpustakaan dan posisi tawar terhadap Dirjen Dikti.

"Maksudnya, penyamaan dasar keilmuan perpustakaan ini agar terdapat penyamaan kompetensi yang hingga saat ini dipandang berbeda-beda oleh masing-masing perguruan tinggi," katanya.

Selama ini, kompetensi keilmuan perpustakaan berbeda-beda berdasarkan pandangan Kemendikbud dan Kemenag. Sehingga, kinerja yang dihasilkan tidak maksimal. Masing-masing perguruan tinggi, kata Wina, menamakan prodi ilmu perpustakaan sendiri karena tidak

adanya patokan yang jelas.

Padahal, penyamaan nama dan standar yang jelas dalam ilmu perpustakaan sangat penting dilakukan. Hal ini, agar tercapai suatu standar internasional sehingga para lulusannya dapat diakui di seluruh dunia. "Kini, yang berkembang di dunia internasional adalah yang berhubungan dengan *library and information*. Sehingga, mau tidak mau, kita harus sesuai dan mengikuti perkembangan tersebut," ucapnya.

Dengan dasar yang jelas, kata Wina, menjadi kendaraan yang memperkokoh ilmu perpustakaan itu sendiri. Dengan adanya Aspika, pengajuan nama prodi yang serempak dari seluruh perguruan tinggi yang menyelenggarakan prodi ilmu perpustakaan dapat mengajukannya ke Dirjen Dikti.

Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom), Engkus Kuswarno mengungkapkan, selama empat dekade ini penyelenggaraan pendidikan Ilmu Informasi Perpustakaan di Indonesia ditandai dengan ketidaksamaan penamaan program studi, jurusan, fakultas, gelar lulusan, kompetensi lulusan hingga kurikulum yang diberlakukan. Tentunya, kata dia, perbedaan akan berdampak pada lemahnya pengembangan program studi dan kualitas lulusannya.

"Kurikulum nasional tentang pustakawan dikeluarkan oleh Mendikbud pada 2001, harus segera direvisi," katanya. Tentunya, hal itu harus dengan kerja sama lembaga penyelenggara ilmu Informasi dan Perpustakaan Indonesia dan Ditjen Dikti. ■ ed: agus yulianto